HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2021

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 6, LD KABUPATEN TEBO 2021/NO.6 , 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo; bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tebo yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas, ruang lingkup pelayanan publik (pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif), pembina dan penanggung jawab, organisasi penyelenggara, kerjasama penyelenggara, hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana, serta masyarakat, penyusunan, penetapan, maklumat, dan penerapan standar pelayanan, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, pengawasan, penyelesaian pengaduan, sanksi administratif, serta ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2021.

Batang Tubuh : 20 Halaman

Penjelasan : 11 Halaman